

# **IMPLEMENTASI PERPRES NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**Muhammad Guruh<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Perpres no.15 tahun 2010 Tentang Penanggulangan kemiskinan (studi tentang PNPM mandiri perkotaan) di kelurahan panji kecamatan Tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Serta factor-faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Perpres no 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan (studi tentang PNPM mandiri perkotaan) di kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara) terdiri dari 5 tahapan yaitu tahap persiapan dan sosialisasi, tahap pengajuan proposal usulan kegiatan sosial, tahap verifikasi kelayakan proposal, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahapan evaluasi. Untuk program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan pada tahun 2014 yaitu santunan untuk lansia, kursus komputer, pelatihan menjahit, kursus/pelatihan otomotif dan sosialisasi pengolahan sampah. Faktor pendukung kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan selama ini diantaranya partisipasi masyarakat, lokasi tempat realisasi kegiatan, proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas dari para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara faktor penghambat kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan selama ini diantaranya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan/kursus yang masih minim, belum optimalnya masyarakat mengembangkan potensi wilayah, serta penentuan usulan prioritas Kelurahan.*

***Kata Kunci:*** Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:mguruh499@gmail.com

## **Pendahuluan**

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwasanya “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dengan kata lain, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah.

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 03 April 2007 di kota Palu Sulawesi Tengah merupakan representasi dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Melalui observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, peneliti menemukan bahwasannya pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong. Sejauh ini telah ada bermunculan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya, namun belum ada program yang berjalan layaknya PNPM Mandiri.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Implementasi***

Implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 2008) mengatakan bahwa implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman, kebijakan-kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2008:145) mengatakan, “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

### ***Teori dan Konsep Kebijakan***

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budi Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

### ***Konsep Implementasi Kebijakan***

Menurut Santosa (2008:43) implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

Selain itu juga, menurut Wahab (2008:64), “implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden)”.

### ***Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan***

Di dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwasanya kemiskinan merupakan

permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan dan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Eddy Ch. Papilaya (dalam Zubaedi: 2013) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

### ***Kemiskinan***

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan (Sunyoto Usman, 2006).

### ***Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)***

Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Diantaranya ialah Klaster 1 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Klaster 2 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan Klaster 3 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Made Winartha (2006:134) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, disini peneliti merupakan instrumen kunci, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskripsikan Implementasi Perpres No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan) di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Fokus Penelitian**

- Fokus dalam penelitian Implementasi Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan) di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

A. Santunan Untuk Lansia

B. Kursus Komputer

C. Pelatihan MenjahitD.

Kursus / Pelatihan Otomotif

- Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan) di Kelurahan Panji.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan***

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Kelurahan Panji, mengenai bagaimana implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, maka dapat dilihat bahwa program kegiatan yang telah berjalan untuk tahun 2014 terdiri dari 5 (lima) pelaksanaan kegiatan. Yaitu, program pelaksanaan santunan untuk lansia, kursus/pelatihan komputer, pelatihan menjahit, kursus/pelatihan otomotif dan sosialisasi pengolahan sampah. Berikut uraian dari peneliti berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan terkait program usulan yang telah disetujui dan bagaimana pelaksanaannya:

#### ***Pelaksanaan Santunan Untuk Lansia***

Pada tahap pelaksanaan, dibuatlah gambaran rencana kegiatan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan santunan untuk lansia yang dibuat oleh tim fasilitator. Kemudian selanjutnya, dibuatlah rekapitulasi anggaran biaya untuk proses pelaksanaan kegiatan santunan untuk lansia tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian Konsultan Manajemen Wilayah atau PJOK, apabila Pihak Kedua tersebut terbukti melakukan penyimpangan terhadap ketentuan teknis atau ditemukan adanya penyalahgunaan dana maka Pihak Pertama dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua berupa penghentian sementara pencairan dana dan atau pemutusan perjanjian dan atau pengembalian dana dan atau sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal penyelesaian kegiatan, setelah kegiatan selesai 100% atau minimal 97% Pihak Kedua berhak mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dan Konsultan untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan. Hasil Sertifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2). (*Sumber: LKM "Panji Makmur" Kelurahan Panji 2014*)

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan atas pelaksanaan program santunan untuk lansia yang telah dilaksanakan tersebut, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak BD selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sungkai di Kelurahan Panji:

"Tanggapan saya dengan pernah diadakannya kegiatan santunan untuk lansia di wilayah kami di Kelurahan Panji. Kegiatan yang dijalankan pada tahun 2014 lalu tersebut, manfaatnya sangat dirasakan, para lansia yang sebelumnya masih sering kekurangan biaya untuk hidupnya sehari-hari, menjadi terbantu dengan adanya santunan dari PNPM. Bahkan ada yang bisa membuka usaha berjualan kue dari santunan tersebut. Kami harap pemerintah kembali melanjutkan program PNPM yang sudah lama kabarnya akan dilanjutkan lagi ini." (Hasil wawancara, 5 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi dari Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sungkai di Kelurahan Panji bahwasanya pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan selama ini sangat baik dan hampir tidak menemukan masalah yang berarti.

Untuk menambah informasi, peneliti pun melakukan wawancara dengan Bapak JN selaku anggota PK LKM 10 Panji Makmur di Kelurahan Panji, berikut adalah hasil wawancara:

"Tanggapan saya atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selama ini cukup baik, karena mampu menunjang kehidupan secara pribadi, membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Walaupun program ini belum ada dilaksanakan lagi, dan yang terakhir berjalan itu adalah program pembangunan fisik di tahun 2014, besar harapan agar program ini tetap dilanjutkan oleh pemerintahan daerah dalam upaya pengembangan- pengembangan yang lebih baik lagi. Karena meskipun tanggapan atas program PNPM ini sangat baik di mata masyarakat, namun juga harus ada hal-hal yang diperbaiki, seperti keberagaman program yang dijalankan, agar tidak hanya terpaku pada program yang bersifat jangka pendek saja." (Hasil wawancara, 7 Agustus 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan PK LKM 10

Panji Makmur di Kelurahan Panji tersebut, maka didapatkan informasi yang cukup berbeda, dimana untuk pelaksanaan program usulan yang disetujui selanjutnya, diharapkan agar tidak hanya terpaku pada program yang bersifat jangka pendek saja, tetapi juga sebisa mungkin dapat memandang secara luas apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dalam meningkatkan potensinya.

Namun untuk hal tersebut, peran dari pihak pemerintah juga sangat menentukan bagaimana sikap dari masyarakat itu sendiri. Dan oleh karena itu, aparatur pemerintahan setempat, para kader terkait serta para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji sendiri, dituntut untuk bekerja lebih keras lagi dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada anggota masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan.

### ***Pelaksanaan Pelatihan/Kursus Komputer***

Pada tahap ini, dibuatlah rekapitulasi rencana anggaran dan biaya untuk jenis kegiatan pelatihan/kursus komputer oleh para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji (lampiran). Dalam rencana tersebut telah diperhitungkan berapa total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan teknis dan operasional selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, mulai dari persiapan dan operasional kegiatan.

Selanjutnya, untuk usulan kegiatan pelatihan/kursus komputer ini, telah dibuat berita acara mengenai musyawarah yang dilakukan untuk kesanggupan swadaya masyarakat. Yang mana bahwa jika usulan tersebut disetujui dan akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan, maka masyarakat sepakat siap dan sanggup untuk memberikan swadaya.

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagai tersebut akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Kemudian setelah proses tersebut telah selesai, maka dikeluarkanlah Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) Panji Makmur dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 012-1/PNPM-MP/PJOK-TGR/V/2014 Tanggal 25 September 2014. Dimana Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Panji Makmur yang bernama Thoat .M bertindak atas nama forum berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kelurahan Panji dan disahkan/dicatatkan di Notaris, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Madani yang bernama Burhanuddin berdasarkan hasil musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan disahkan/dicatatkan pada buku register BKM Panji Makmur tentang KSM dengan No. Induk 001Kelurahan Panji. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat

membuat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk kegiatan ini, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada dokumen usulan proposal pelaksanaan kegiatan Pihak Kedua bersangkutan, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan mengawasi kegiatan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan tenaga teknis pelaksana (tenaga ahli), persiapan peralatan dan operasional, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun sementara yang diperlukan untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.
3. Pihak Pertama berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan. Dan berkewajiban memantau dan memberikan bimbingan keterampilan kepada Pihak Kedua. Pelaksanaan hal ini selanjutnya secara harian akan dijalankan oleh Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL).
4. Pelaksanaan pencairan dana tersebut akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap melalui bank Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 60% dan tahap ketiga sebesar 10%.  
(Sumber: LKM “Panji Makmur” Kelurahan Panji 2014)

Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam pertemuan/musyawarah. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima. Pihak Kedua juga wajib menyebarluaskan SPPB BLM tersebut melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di Kelurahan Panji. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya, usulan kegiatan program telah dapat direalisasikan. (Sumber: LKM “Panji Makmur” Kelurahan Panji 2014)

### ***Pelaksanaan Pelatihan/Kursus Menjahit***

Untuk kegiatan pelatihan/kursus menjahit di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara BKM Panji Makmur dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 08-1/PNPM-MP/PJOK-TGR/V/2014 Tanggal 29 September 2014. Dimana Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Panji Makmur yang bernama Thoat .M bertindak atas nama forum berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kelurahan Panji dan disahkan/dicatatkan di Notaris, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bernama Abdul Ghafur berdasarkan hasil



musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan disahkan/dicatatkan pada buku register BKM Panji Makmur tentang KSM dengan No. Induk 004 Kelurahan Panji. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membuat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah nilai perjanjian kerja untuk kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada dokumen usulan proposal pelaksanaan kegiatan Pihak Kedua bersangkutan sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pihak Kedua, berkewajiban mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan tenaga teknis pelaksana kegiatan (instruktur/pelatih), sarana peralatan menjahit dan sebagainya. Serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen atau bersifat sementara yang diperlukan untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.
3. Pihak Pertama berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan.
4. Pelaksanaan pencairan dana tersebut akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap melalui bank Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 60% dan tahap ketiga sebesar 10%.

Sebagaimana juga pada pelaksanaan pada program yang dijelaskan sebelumnya, pada pelaksanaan program pelatihan menjahit ini, Pihak Kedua juga akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam pertemuan/musyawarah. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima. Pihak Kedua juga wajib menyebarluaskan SPPB BLM tersebut melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di Kelurahan. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perkotaan. (*Sumber: LKM "Panji Makmur" Kelurahan Panji 2014*)

### ***Pelaksanaan Kursus/Pelatihan Otomotif***

Pada tahap pelaksanaan, dibuatlah gambaran rencana kegiatan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan kursus/pelatihan otomotif yang dibuat oleh tim fasilitator. Kemudian selanjutnya, dibuatlah rekapitulasi anggaran biaya untuk proses pelaksanaan kegiatan kursus/pelatihan otomotif tersebut.

Selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara LKM Panji Makmur dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 015-1/PNPM-MP/PJOK-TGR/V/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 dimana berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kelurahan dan disahkan, bahwa Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Panji Makmur Bapak Thoat M. bertindak atas

nama forum yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sungkai Kelurahan Panji yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, saling menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah nilai perjanjian kerja untuk kegiatan yang tertuang di dalam Pasal (1) SPPD-L ini, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada dokumen usulan proposal pelaksanaan kegiatan Pihak Kedua bersangkutan sebesar Rp. 8.000.00 (delapan juta rupiah).
2. Pihak Kedua, berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan persiapan dan operasional kegiatan, seperti konsumsi dan persiapan lainnya, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen atau bersifat sementara yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.
3. Pihak Pertama, berkewajiban membayar kepada Pihak Kedua atas persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan.
4. Pelaksanaan pencairan dana tersebut akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap melalui Bank Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 60% dan tahap ketiga sebesar 10%. (*Sumber: LKM "Panji Makmur" Kelurahan Panji 2014*)

Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam pertemuan/musyawarah. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat berita acara serah terima/tanda terima.

Pihak Kedua juga wajib menyebarluaskan SPPB BLM tersebut melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di Kelurahan Panji. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya, usulan kegiatan program telah dapat direalisasikan. (*Sumber: LKM "Panji Makmur" Kelurahan Panji 2014*)

PNPM Mandiri Perkotaan diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi dan aturan main.

Untuk pelaksanaan program dari PNPM Mandiri Perkotaan selama ini, berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak HM, selaku Lurah Kelurahan Panji:

"Dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan ini tanggapan saya sangat positif. Karena dapat membantu meningkatkan pembangunan di wilayah Kelurahan Panji ini sendiri. Untuk program pembangunan yang dilakukan terakhir dilakukan pada tahun 2014, dan untuk program lanjutannya sampai pada sekarang ini, masih belum ada yang berjalan. Padahal kami sangat mengharapkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan ini masih tetap

lanjut dijalankan sekalipun berganti pemerintahannya, dan jangan sampai dihilangkan karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, dan untuk pemeliharaan kegiatan semua lapisan masyarakat bisa ikut berperan.” (Hasil wawancara, 4 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya tanggapan dari pemerintah Kelurahan khususnya Kelurahan Panji adalah sangat baik dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan. Karena program pemerintah ini meletakkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utamanya. Sehingga bukan hanya mengenai program-program apa yang dijalankan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga masyarakat mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kualitas dalam hal kelembagaan dan keikutsertaan dalam setiap jenjang proses dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini sendiri. Dan untuk proses pemeliharaan kelancaran program, semua lapisan masyarakat bisa turut berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan.

Selain daripada hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Lurah Kelurahan Panji, ada informasi penting lainnya yang peneliti dapatkan, bahwasanya program PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di tahun 2014, sangat diharapkan keberlanjutannya pada masa mendatang. Adapun program yang dicanangkan sebagai tindak lanjut dari PNPM Mandiri Perkotaan sendiri sampai pada saat ini masih belum dilaksanakan.

Kemudian, hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak AS, selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Panji. Berikut hasil wawancara dengan Bapak AS, yang dilakukan oleh peneliti:

“Kegiatan PNPM – MP di Kelurahan kami selama ini sudah baik sekali. Apa yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat bisa tertampung untuk kemudian diproses menjadi usulan. Sehingga, PNPM-MP ini bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa kabar dari keberlanjutan PNPM – MP sampai pada sekarang ini sendiri masih abu-abu. Dalam artian, belum ada realisasi dari pemerintah pusat. Padahal kami sangat mengharapkan program ini dapat dijalankan kembali.” (Hasil wawancara, 4 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji selama ini sudah baik karena mampu menyerap aspirasi masyarakat bawah, dan turut mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat yang terwujud dalam bentuk usulan kegiatan.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji***

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui

kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme PNPM Mandiri Perkotaan ini dapat berjalan lebih efektif.

Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat selama ini sering ditemukan kualitas pemberdayaan masyarakat yang tidak memadai. Fasilitator yang mendampingi masyarakat hanya berfungsi sebagai tenaga penyuluh teknis terkait sektor tertentu tanpa keahlian mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Di sisi masyarakat, hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap program sehingga menimbulkan masalah terkait keberlanjutan pasca kursus atau pelatihan berakhir.

Faktor pendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini diantaranya ialah tentu saja dari pihak pemerintah dan masyarakat sendiri, dan dengan keberadaan program PNPM Mandiri Perkotaan lah yang kemudian memberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk melaksanakan program yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga, jika berbicara mengenai faktor penghambat nya ialah tentu saja konsistensi dari program PNPM Mandiri Perkotaan ini sendiri yang masih belum dilaksanakan kembali sampai sekarang.

### **Kesimpulan**

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang telah berjalan di Kelurahan Panji, dalam pelaksanaannya selama ini selalu mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya, mulai dari penggalian usulan warga dalam setiap sosialisasi, hingga pada proses pembuatan proposal yang telah disetujui dan siap untuk dilaksanakan pengerjannya di lapangan, usulan berasal dari masyarakat. Program santunan untuk lansia, program kursus komputer, program pelatihan menjahit, program kursus/pelatihan. kesemuanya merupakan usulan prioritas yang telah dilaksanakan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji pada program pelatihan Pendidikan ataupun kursus/keterampilan yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat, diantaranya yakni santunan untuk lansia, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat karena telah membantu meringankan salah satu beban para lansia yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kursus komputer, yang juga sangat membantu memberikan pendidikan keterampilan dan pengetahuan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti kursus dengan mengeluarkan biaya pribadi. Pelatihan menjahit, juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelatihan yang bisa menumbuhkan keterampilan yang berguna. Kursus/pelatihan otomotif, juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mendapatkan pengetahuan

- baru tentang dunia otomotif yang bisa dikembangkan dan dijadikan peluang usaha.
3. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji selama ini diantaranya ialah masyarakat sendiri yang bertindak sebagai pelaku utama pembangunan dan turut berpartisipasi dalam setiap tahapan dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat realisasi kegiatan juga menjadi faktor yang sangat penting. Proses sosialisasi juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dari para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji juga sangat membantu bagi peningkatan kinerja bagi pelaksanaan PNPM MP selanjutnya.
  4. Sementara untuk faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji selama ini diantaranya ialah minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan/kursus yang masih minim. Penentuan usulan prioritas diantara banyaknya jumlah usulan dari masyarakat karena harus memperhatikan benar untuk program mana yang didahulukan. Kemudian, konsistensi dari implementasi PNPM Mandiri Perkotaan ini sendiri yang belum kunjung dilaksanakan kembali baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, padahal program ini sangat baik untuk masyarakat.

### **Saran**

1. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panjisebaiknya lebih menekankan pada program-program yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat terutama RTM (Rumah Tangga Miskin), dan program tidak hanya berhenti sampai pada tahap pelaksanaan sampai akhir saja, tetapi bagaimana keberlanjutan setelah itu, agar program tidak sekedar hilang dan timbul, tetapi juga benar-benar bermanfaat dan dilanjutkan kearah yang lebih berkembang lagi.
2. Untuk memberikan motivasi dalam hal kinerja keanggotaan dan kepengurusan PNPM Mandiri Perkotaan sebaiknya dibuat suatu penilaian atas kinerja masing-masing kader dan pelaku PNPM Mandiri Perkotaan selama menjalankan peran mereka, hal ini dimaksudkan agar dengan diberikan penghargaan sebagai kader terbaik, pelaku PNPM Mandiri Perkotaan terbaik, atau warga masyarakat dengan partisipasi terbaik dalam suatu periode tertentu, dapat memberikan motivasi dan semangat lebih bagi seluruh pihak untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja mereka. Untuk di Kelurahan Panji secara keseluruhan baik pihak aparaturn pemerintahan Kelurahan maupun dari masyarakat agar dapat mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilaksanakan selama

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ini, dan terus meningkatkannya lagi kearah yang lebih baik dan lebih berkembang demi terwujudnya pembangunan yang maju.

### **DaftarPustaka**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrsi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial (berbagai alternatif pendekatan)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).
- Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Edisi II)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*. Jakarta: PT Kencana.